

## **INTISARI**

**Nama : Lintar Setyanto**

**NIM : 151090234**

**Judul Skripsi : Politik Keterbukaan Arab Saudi Dibawah Kepemimpinan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Sejak Tahun 2005**

Arab Saudi merupakan salah satu negara di wilayah Jazirah Arab yang berbatasan secara langsung dengan beberapa negara lainnya, yaitu Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia dan Oman. Negara ini memiliki dinamika politik-pemerintahan yang statis karena dijalankan dengan sistem monarkhi absolut, keberadaan raja yang memimpin negara ini dijalankan berdasarkan garis keturunan. Sejak tahun 2005 negara ini dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Aziz yang berhasil menggantikan Raja Fadh bin Abdul Aziz.

Arab Saudi merupakan negara Islam monarki yang konstitusinya berdasarkan pada Hukum Islam yang tidak berorientasi pada peran seseorang untuk terlibat dalam pembuatan atau perumusan hukum. Aturan pelaksanaan dari Hukum Islam tersebut diawali dengan beroperannya "Dewan Kerajaan" yang disebut Nizams. Pemberlakuan Hukum Islam tersebut dengan menempatkan Al-Quran sebagai dasar konstitusi Arab Saudi dan pada prakteknya konstitusi itu tidak bisa diadaptasikan dalam situasi apapun yang bersifat modern. Asumsi dari kebijakan itu menekankan bahwa Al-Quran adalah suatu kitab suci yang sempurna dibandingkan dengan konstitusi sekuler

lainnya, dan Al-Quran sesuai dengan prinsip kehidupan masyarakat Arab Saudi. Karena itu Islam merupakan agama satu-satunya di Arab Saudi.

Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh dewan menteri yang mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Raja Arab Saudi disamping sebagai kepala negara, juga merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri dari lebih 4000 pangeran yang paling dituakan diantara kepala-kepala suku yang terdapat di wilayah kerajaan, pemuka para ulama yang merupakan penasehatnya dalam urusan agama dan pelayan dua tanah suci; Mekkah dan Medinah.

Arab Saudi tetap mempertahankan otoritas keagamaan dan politik tradisionalnya. Pertalian keluarga tetap merupakan faktor utama dalam pemerintahan. Dewan Keluarga menjalankan pemerintahan dan bekerja dengan konsensus. Raja Saudi menjaga hubungan keluarga atau majelis dengan kepala-kepala suku dan kepala regional, dan mereka mengangkat anggota keluarga dan kepala suku yang setia untuk jabatan kementrian dan administratif.

Sejak keluarga Ibnu Saud berkuasa, pemerintahan Arab Saudi sudah tidak lagi sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah. Negeri ini bukanlah lambang dari pemerintahan Islam karena Al-Quran tidak dilaksanakan secara sempurna.

Perubahan situasi politik dan kondisi di Arab Saudi terlihat dalam berbagai hal yang terjadi di bawah ini. Pertama, Arab Saudi dan perannya terhadap perdamaian

di Timur Tengah. Persepsi Arab Saudi mengenai dunia khususnya mengacu pada pandangan dunia Islam klasik. Menurut konsep itu, posisi utama harus ditempati oleh masyarakat Muslim yang tidak lain adalah orang-orang Saudi yang berperan sebagai penjaga kota suci umat Islam, seperti kota Mekkah dan Madinah, yang mempunyai tanggung jawab khusus dalam melindungi masyarakat Muslim dan pandangan hidup Islam. Pandangan tersebut menjadi komitmen utama dari prioritas Arab Saudi dalam kebijakan luar negerinya, oleh sebab itu Arab Saudi menganggap zionisme merupakan salah satu ancaman yang hebat terhadap pandangan hidup kaum Muslimin selain komunisme. Dalam hal ini komunisme dianggap sebagai anti agama dan Israel dianggap sebagai bagian dari zionisme yang menghalangi umat Islam yang ingin berziarah ke Masjidil Aqsa. Pada tahun 2002, Raja Abdullah bin Abdul Aziz (Raja yang duduk sebagai pemimpin di Arab Saudi pada saat ini) mendobrak kebekuan diplomasi perdamaian Timur Tengah dengan melontarkan inisiatif damai dengan Israel. Inisiatif ini kemudian diadopsi oleh forum KTT Arab di Beirut tahun 2002 sebagai inisiatif damai Arab.

Kedua, Perihal penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih dewan kota. Di Arab Saudi tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, dalam kinerjanya Raja dibantu oleh dewan menteri yang mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang disebut dengan Dewan Shura. Dewan Shura seluruhnya ditunjuk oleh Raja dan memiliki beberapa kekuasaan untuk memeriksa lembaga lainnya. Namun pada tanggal 13 Februari 2003, Arab Saudi telah

mengumumkan akan menyelenggarakan pemilihan umum yang diadakan pertama kalinya pada tahun 2005 untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Pengumuman tersebut menyusul keputusan sidang Dewan Kabinet Arab Saudi yang diadakan pada hari itu juga, berupa perluasan partisipasi penduduk dalam urusan daerah atau kota melalui pemilihan umum.

Ketiga, tentang dibentuknya Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada bulan Mei di tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud bin Faisal, mengumumkan bahwa Raja Fahd bin Abdul Aziz telah menyetujui pembentukan Komite Hak Asasi Manusia nonpemerintah dan menegaskan bahwa komite itu independen dan pemerintah akan berusaha membantu agar komite tersebut independen dan mandiri. Ia juga membantah adanya tekanan luar negeri dibalik pembentukan komite hak asasi manusia. Negara-negara muslim secara dominan, seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Arab Saudi, sering mengkritik pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atas kegagalan pernyataan ini memahami konteks religius dan kebudayaan negara-negara non-Barat.

Pada tahun 1981, perwakilan Iran untuk Amerika Serikat, Said Rajaie-Khorassani, mengeluarkan pendapat atas posisi negaranya mengenai pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dengan berkata bahwa *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) adalah "Sebuah pemahaman sekular dari tradisi Yahudi-Kristen", yang mana tidak bisa diimplementasikan oleh muslim tanpa melalui hukum-hukum Islam.

Keempat, Tentang peran wanita di Arab Saudi dan penyusunan kembali Komisi Ulama Senior. Kaum wanita di Arab Saudi yang selama ini mendapat pembatasan sedemikian rupa di berbagai bidang, seperti dalam urusan perjalanan, pengobatan, kepemilikan, kawin dan cerai, bahkan hingga saat ini dilarang mengemudikan kendaraan. Jabatan-jabatan penting di berbagai bidang hanya bisa dijabat kaum pria. Ini terjadi karena fatwa (petuah atau jawaban atas persoalan) dari kaum ulama menolak pencampurbauran antara kaum lelaki dan wanita. Tetapi Raja Abdullah merombak sejumlah jabatan dalam pemerintahan. Media pemerintah mengatakan, perombakan itu meliputi pengangkatan seorang perempuan pertama yang menjadi deputy menteri kabinet dalam kerajaan yang konservatif itu. Noura Al-Fayez diangkat menjadi deputy menteri bagi pendidikan anak-anak perempuan pada tanggal 14 Februari 2009. Laporan Media Arab juga mengatakan, Raja Abdullah telah menyusun kembali Komisi Ulama Senior yang meliputi 21 anggota dari semua cabang Islam Sunni.

Raja Abdullah juga mengganti Gubernur Bank Sentral Hamad Saud Al Sayyari dengan deputynya, Muhammad Al-Jasser, dan mengangkat Menteri Kehakiman dan Menteri Informasi baru serta kepala baru Dewan Penasihat Shura. Perubahan besar susunan pemerintahan ini yang pertama sejak Raja Abdullah menduduki singgasana pada Agustus 2005.

Raja Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud naik takhta pada tanggal 3 Agustus 2005 setelah wafatnya Raja Fahd (Raja ke-5 Arab Saudi). Ia sebenarnya sudah

menjadi penguasa *de facto* sejak tahun 1995 ketika Raja Fahd terserang stroke. Abdullah adalah salah satu dari 37 putra Raja Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Suud (Raja pertama, pendiri Arab Saudi modern) yang lahir dari ibunya bernama Fahada binti Asi Al-Shuraim, isteri ke-8 Abdul Aziz dari keluarga Rasyid. Abdullah lahir tahun 1924, beristri 4, berputra 10 dan berputri 10. Ia mendapat pendidikan tradisional di lingkungan Sekolah Kerajaan di tangan para ulama kenamaan dan dibesarkan di bawah pengawasan langsung Raja Abdul Aziz.

Raja Abdullah tampaknya ingin memberikan pesan kepada masyarakat internasional dan rakyatnya bahwa Arab Saudi memiliki komitmen untuk melaksanakan pembaruan dan perubahan (reformasi). Raja Abdullah dalam berbagai forum sering menegaskan bahwa cara terbaik menghadapi tantangan adalah dengan membangun negara yang kuat dan mampu bergerak maju dengan semangat akomodatif (bisa menerima) dan adaptif (mampu menyesuaikan diri) di tengah hempasan perubahan yang begitu cepat. Akhir-akhir ini, Raja Abdullah juga melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk mengadakan usaha-usaha perdamaian dan dialog antar agama. Hal ini membuktikan bahwa Arab Saudi di bawah kuasa Raja Abdullah lebih membuka diri dalam politik global dan mampu menjadi pelopor gerakan perdamaian dunia.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini terkait dengan proses reformasi yang terjadi di Arab Saudi, faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya

reformasi di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud?

Yang mendorong terjadinya reformasi di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz adalah, karena terjadinya delegitimasi kepemimpinan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tingkat kekecewaan rakyat Arab Saudi terhadap pemerintah yang ditunjukkan dalam bentuk aksi demonstrasi hingga aksi bom bunuh diri yang mengancam keamanan warga asing dan yang terpenting mengancam keamanan dan terror bagi warga Arab Saudi sendiri. Disamping itu, Tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi yang semakin menurun dan ditambah dengan angka pengangguran yang tinggi semakin membuat rakyat Arab Saudi mmendesak para pemimpin untuk melakukan perubahan di Arab Saudi. Sehingga Raja Abdullah mulaimelakukan reformasi dengan cara memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut serta berperan serta dalam urusan kenegaraan, meskipun peranrakyat belum begitu besar namun langkah ini dirasa jitu untuk mempertahankan legitimasi dari rezim Raja Abdullah Bin Abdul Aziz.